

Jejak Artikel:

Unggah: 17 Maret 2024;

Revisi: 22 Maret 2024;

Diterima: 27 Maret 2024;

Tersedia Online: 10 April 2024

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, *Whistleblowing System*, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan *Fraud* (Studi Pada Inspektorat Daerah Kota Bandung)

Lathifah Nur'aini¹, Salza Adzri Arismutia²

¹²Universitas Indonesia Membangun

lathifahn22@gmail.com

The goal of this study is to determine the relationship between fraud prevention in the Bandung City Regional Inspectorate and the government's internal control system, whistleblower system, and human resource competency. This data collection used several studies, namely, field research, literature study, interviews, and distributing questionnaires to 65 respondents with a research sample of Bandung City Regional Inspectorate Auditors which was the method used to collect data. Quantitative techniques, such as verification and descriptive methods, were employed in this study. In this study, saturated sampling combined with non-probability sampling was the research sample strategy or sampling technique. The degree of sample influence is measured using the coefficient of determination, multiple linear regression analysis, classical assumption test analysis, and hypothesis testing. The Statistical Product and Service Solution Application version 26 is used in this data processing. Thus, the study's findings suggest that while human resource competency has no discernible impact on fraud prevention, the government's internal control and whistleblower systems have an impact on it. Simultaneous research findings indicate that fraud prevention is influenced by the government's internal control system, whistleblower mechanism, and human resource competency. Therefore, it can be said that internal government controls account for 74% of fraud prevention, external variables account for 26%, and the violation reporting system and human resource competency account for 74%.

Keywords: *Fraud Prevention, Government Internal Control System, Human Resources Competency, Whistleblowing System*

Pendahuluan

Korupsi marak terjadi meskipun sudah ada banyak inisiatif. Para koruptor, baik pegawai pemerintah maupun anggota komunitas korporat, terlibat dalam berbagai praktik korupsi. Setiap tahun, beberapa bentuk korupsi yang lazim terjadi tetap ada dan semakin populer. Pada tanggal 31 Mei 2022, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, memberikan kesaksian bahwa korupsi yang paling banyak terjadi yaitu pada sektor bisnis. Pelaku bisnis terlibat dalam 802 kasus penyuapan antara tahun 2004 dan 2022. Pembelian barang dan jasa merupakan cara umum lain yang sering digunakan untuk melakukan korupsi, yaitu sebanyak 263 kasus. Di sisi lain,

¹Coressponden: Lathifah Nur'aini. Universitas Indonesia Membangun. Jl. Soekarno Hatta No.448, Batununggal, Bandung Kidul, Kota Bandung. 40266. lathifahn22@gmail.com

terdapat 25 kasus korupsi terkait perizinan. Menurut statistik KPK, 367 pihak swasta ditahan karena penyuapan dan gratifikasi antara tahun 2004 dan 2022 (Ferdiansyah, 2022).

Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menggambarkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK kepada Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2023. Berdasarkan CaLK, Pemerintah Kota Bandung menyajikan Belanja Modal Peralatan & Mesin sebesar Rp365.925.785.256,00 dan Aset Tetap Peralatan & Mesin sebesar Rp3.606.557.009.832,72. Dari nilai tersebut diantaranya terdapat Belanja Modal Alat Pemantau Lalu Lintas berupa *Closed Circuit Television (CCTV)* sebanyak 13 unit sebesar Rp2.444.607.976,00 pada Dinas Perhubungan yang dilakukan tanpa analisis kebutuhan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun tidak berdasarkan *survey* harga pasar, pelaksanaan dilakukan dengan pemecahan kontrak diindikasikan untuk menghindari ketentuan pelelangan, dan pemberian *fee* kepada enam perusahaan yang dilakukan oleh PT. SMA sebesar Rp70.000.000,00. Pada Tahun 2021 terdapat kegiatan Belanja Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) berupa 30 unit CCTV sebesar Rp2.947.450.000,00 tidak tercatat pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin, dengan pelaksana CV. SAP yang terindikasi berafiliasi dengan PT. SMA. Pada Tahun 2023 diketahui PT. SMA bersama Wali Kota Bandung, Kepala Dinas Perhubungan, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proses hukum dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian dan pengungkapan terkait hal tersebut (Susanti, 2023).

Kasus penipuan yang meluas menyebabkan kerugian yang signifikan bagi sebuah organisasi. Kecurangan akan berakibat fatal bagi bisnis jika tidak diidentifikasi dan dicegah. Oleh karena itu, untuk menghentikan kecurangan, pimpinan entitas harus bertindak dengan tepat.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui Pencegahan *Fraud* pada Inspektorat Daerah Kota Bandung, (2) Untuk mengetahui Sistem Pengendalian Internal pada Inspektorat Daerah Kota Bandung, (3) *Whistleblowing System* di Inspektorat Daerah Kota Bandung, (4) menilai kompetensi sumber daya manusia; (5) menilai bagaimana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pelaporan Pelanggaran, dan Kompetensi SDM mempengaruhi pencegahan kecurangan; dan (6) menilai dampak gabungan dari faktor-faktor tersebut terhadap Pencegahan Kecurangan secara bersamaan.

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan, menurut Hantono (2021:42), adalah akuntansi yang digunakan oleh organisasi nirlaba yang memiliki misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dan organisasi nirlaba menerima sebagian besar pendanaannya dari pajak, hadiah, utang, dan pendapatan bisnis lokal atau milik negara.

Sementara itu, Sadat (2020:9) menyatakan bahwa transaksi yang terjadi pada entitas pemerintah harus didokumentasikan dan dilaporkan. Laporan akuntansi pada aspek manajerial administrasi keuangan negara dihasilkan oleh akuntan pemerintah. Bidang ini juga mencakup pengawasan pengeluaran anggaran negara dan kepatuhannya terhadap persyaratan hukum yang relevan.

Audit Pemerintah

Audit pemerintah, yang juga dikenal sebagai audit sektor publik, dijelaskan oleh Bastian (2010:10) sebagai suatu prosedur yang obyektif dan metodis untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran data yang disediakan dalam laporan keuangan organisasi sektor publik.

Mulyadi dan Kanaka dalam Sunyoto (2014:29) menyatakan bahwa auditor profesional instansi pemerintah melakukan analisis atas laporan keuangan yang diberikan atau disajikan oleh pemerintah.

Audit Internal Pemerintah

Menurut Agoes (2004:221), audit internal melibatkan unit audit internal perusahaan yang memeriksa kepatuhan terhadap undang-undang pemerintah, ketentuan serikat pekerja profesional, dan kebijakan yang ditetapkan oleh atasan, selain melakukan analisis terhadap laporan keuangan dan akuntansi perusahaan.

Sementara itu, audit internal pemerintah, menurut Ristiyanto (2013:7), memiliki tanggung jawab untuk mendukung manajemen sebelum, selama, dan setelah penyelesaian kegiatan. Audit internal pemerintah memberikan nilai bagi manajemen melalui audit, tinjauan, penilaian, pemantauan, dan kegiatan lainnya. Audit internal dilakukan oleh auditor dari pemerintah federal, provinsi, kabupaten, dan pemerintah daerah. Presiden bertanggung jawab atas inspektorat di setiap kementerian dan lembaga non kementerian yang berada langsung dibawah Presiden.

Pencegahan *Fraud*

Anderson (2017) mendefinisikan pencegahan kecurangan sebagai penggunaan kontrol pencegahan, seperti aturan, proses, pelatihan, dan komunikasi, untuk mencegah terjadinya kecurangan. Meskipun mungkin tidak memberikan jaminan 100% terhadap kecurangan, tindakan pencegahan merupakan garis pertahanan pertama yang penting dalam mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan.

Fitrawansyah (2014:16) menegaskan bahwa pencegahan kecurangan adalah cara yang murah untuk memerangi kecurangan. Mencegah kecurangan sama halnya dengan mengobati penyakit - yang terbaik adalah menghindarinya sama sekali.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang penting dalam tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai dengan tujuan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, perlindungan aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan yang diselenggarakan di pemerintah.

Lathifah (2021:2) mengatakan sistem pengendalian intern pemerintah memastikan operasi, pelaporan, dan tujuan. Manajemen, direksi, dan personel mempengaruhinya.

Alfiansyah & Afriady (2022) menemukan bahwa sistem kontrol internal pemerintah mencegah kecurangan. Kecurangan dalam entitas pemerintah dapat dikurangi dengan memperluas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Akhyaar (2022) menemukan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak mempunyai pengaruh terhadap pencegahan penipuan.

Whistleblowing System

Mahdi & Darwis (2020) menyatakan bahwa pelapor dapat melaporkan kondisi internal organisasi dengan menggunakan mekanisme *whistleblowing*. Salah satu strategi untuk menghentikan kecurangan atau korupsi dalam pengelolaan keuangan adalah dengan menerapkan mekanisme *whistleblowing* (Aprillia & Sulfitri, 2023).

Aprillia & Sulfitri (2023) menemukan bahwa Sistem Pelaporan Pelanggaran berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan. Sistem Pelaporan Pelanggaran membantu mencegah terjadinya kecurangan, menurut Lianto & Purnamasari (2020). Hal ini menunjukkan variabel Sistem Pelaporan Pelanggaran mencegah terjadinya kecurangan. Temuan ini bertentangan dengan Yanto (2023), yang menemukan tidak ada dampak pencegahan kecurangan dari *whistleblowing*.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

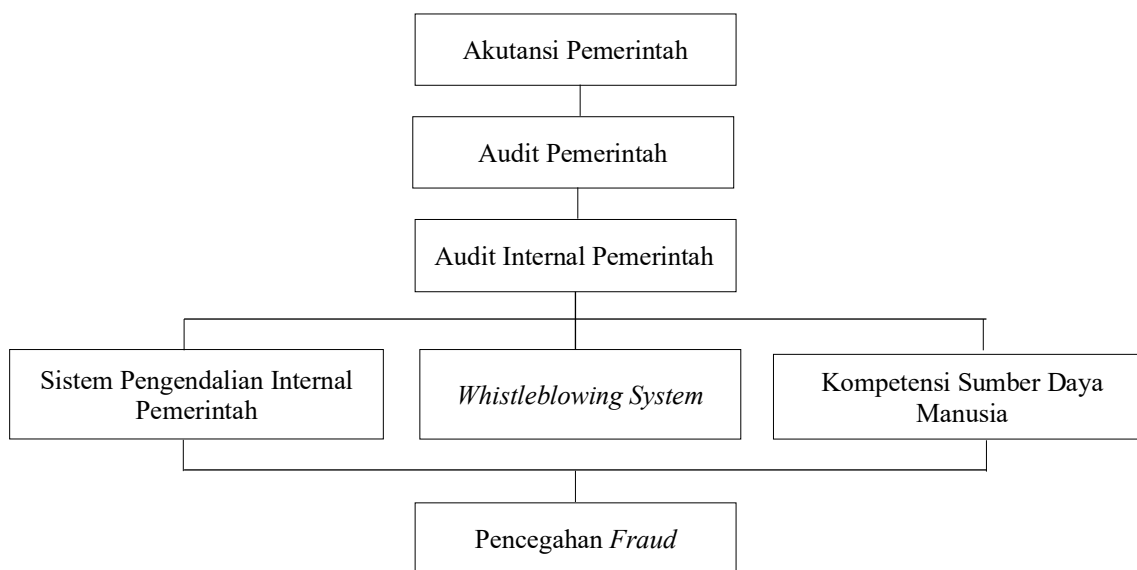
Kompetensi sumber daya manusia, menurut Wibowo (2018:272), adalah kualitas dasar dari setiap orang yang dihubungkan dengan standar yang diukur berdasarkan kinerja kerja yang luar biasa atau berhasil. Oleh karena itu, seorang karyawan yang menunjukkan kompetensi pada tingkat yang lebih tinggi dianggap berkinerja unggul.

Sedangkan menurut Edison (2017:140), kapasitas seseorang untuk mencapai keunggulan dan prestasi kerja yang akurat tergantung pada berbagai faktor, termasuk pengetahuan, kemampuan, dan sikap. Penelitian Suandewi (2021) menunjukkan bahwa kompetensi SDM membantu menghindari terjadinya kecurangan. Hariawan dkk. (2020) tidak menemukan adanya pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan kecurangan.

Kerangka Pemikiran

Sugiyono (2020: 52) mendefinisikan kerangka konseptual sebagai model yang menggambarkan bagaimana sebuah teori berhubungan dengan variabel penting dalam suatu situasi. Kerangka berpikir merupakan proposal atau cerita tentang kerangka konseptual untuk mengatasi masalah yang didefinisikan atau dibangun.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, *Whistleblowing System*, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dibutuhkan seorang Auditor agar Pencegahan Fraud bisa dilaksanakan dengan maksimal. Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar.1 Kerangka Pemikiran

Pengujian Hipotesis

Penulis memberikan hipotesis penelitian berikut berdasarkan kerangka pemikiran dan masalah yang diidentifikasi di atas:

- H0 : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah tidak terdapat pengaruh secara signifikan pada Pencegahan *Fraud*.
- H1 : Sistem Pengendalian Intrnal Pemerintah mempunyai dampak yang positif pada Pencegahan *Fraud*.
- H0 : *Whistleblowing System* tidak memiliki pengaruh pada Pencegahan *Fraud*.
- H2 : *Whistleblowing System* mempunyai pengaruh pada Pencegahan *Fraud*.
- H0 : Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak memiliki pengaruh pada Pencegahan *Fraud*.
- H3 : Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh secara signifikan pada Pencegahan *Fraud*.

- H0 : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, *Whistleblowing System*, Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh pada Pencegahan *Fraud* secara simultan.
- H4 : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, *Whistleblowing System*, Kompetensi Sumber Daya Manusia terdapat pengaruh positif secara signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* secara simultan.

Metode

Metode deskriptif dan verifikatif dikombinasikan metode kuantitatif dalam penelitian ini. Menurut Misbahuddin & Hasan (2022), Analisis yang mengkaji logika yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari temuan penelitian berdasarkan suatu sampel dikenal dengan istilah analisis deskriptif. Karena analisis deskriptif bersifat independen dan dilakukan melalui pengujian hipotesis deskriptif, maka analisis tersebut berbentuk perbandingan atau hubungan yang melibatkan satu atau lebih variabel.

Populasi dan Sampel

Sugiyono (2020:126) mendefinisikan populasi sebagai objek atau individu dengan karakteristik tertentu yang dipelajari dan ditarik kesimpulannya oleh para ilmuwan. Dalam penelitian ini, pendekatan sampel jenuh atau digunakan untuk merekrut 65 karyawan dari Inspektorat Daerah Kota Bandung. Sampling jenuh, menurut Sugiyono dalam Adiputra (2021:127), merupakan pengambilan sampel dari setiap individu dalam populasi kecil. Studi ini melibatkan 65 individu.

Tabel.1 Operasional Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	No. Kuesioner	Skala
Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)	Anderson (2017) mendefinisikan pencegahan kecurangan sebagai penggunaan kontrol pencegahan, seperti aturan, proses, pelatihan, dan komunikasi, untuk mencegah terjadinya kecurangan. Meskipun mungkin tidak memberikan jaminan 100% terhadap kecurangan, tindakan pencegahan merupakan garis pertahanan pertama yang penting dalam mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan.	1. Kebijakan 2. Prosedur 3. Pelatihan 4. Komunikasi	1-2 3-4 5-6 7-8	Ordinal
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X ₁)	Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah bagian penting dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai dengan tujuan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, perlindungan aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan.	1. Lingkunan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi & Komunikasi 5. Pemantauan	1-2 3-4 5-6 7-8 9	Ordinal
Whistleblowing System (X ₂)	Mahdi & Darwis (2020) menyatakan bahwa pelapor dapat melaporkan kondisi internal organisasi dengan menggunakan mekanisme <i>whistleblowing</i> .	1. Aspek Struktural 2. Aspek Operasional 3. Aspek Perawatan	1-2 3-4 5-6	Ordinal
Kompetensi Sumber Daya	Kompetensi sumber daya manusia, menurut Wibowo (2018:272), adalah	1. Pengetahuan (<i>Knowledge</i>)	1-2 3-4	Ordinal

eCo-Buss

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	No. Kuesioner	Skala
Manusia (X_3)	kualitas dasar dari setiap orang yang dihubungkan dengan standar yang diukur berdasarkan prestasi kerja yang luar biasa atau sukses. Oleh karena itu, seorang karyawan yang menunjukkan kompetensi pada tingkat yang lebih tinggi dianggap berkinerja unggul.	2. Keterampilan (<i>Skill</i>) 3. Sikap (<i>Attitude</i>)	5-6	

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk memprediksi hasil studi, data dan informasi diperlukan. Di Kantor Inspektorat Kota Bandung, penelitian lapangan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dan mewawancarai responden.

a. Kuesioner

Penelitian ini mengumpulkan data dengan kuesioner. Kuesioner meminta partisipan untuk menjawab pertanyaan atau menulis pernyataan (Sugiyono, 2020: 199).

b. Wawancara

Masalah ditemukan, informasi lebih lanjut tentang responden dikumpulkan, dan jumlah responden dihitung melalui wawancara. Wawancara didefinisikan sebagai dialog yang didorong oleh tujuan antara dua individu, pewawancara mengajukan pertanyaan dan terwawancara memberikan jawaban (Sugiyono, 2020: 199).

2. Penelitian Kepustakaan (*Literature Research*)

Studi literatur melibatkan penelitian teoritis dan nilai-nilai lingkungan sosial, konvensi, dan budaya (Sugiyono, 2020:291). Penelitian dan literatur ilmiah saling terkait erat, oleh karena itu studi literatur sangat penting.

Hasil

Tabel.2 Uji Validitas

		N	%
Cases	Valid	65	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	65	100.0

Dalam 65 sampel, semua data X_1 , X_2 , X_3 dan Y teramati dengan presentase 100%, sehingga tidak ada data sampel yang hilang/*missing*.

Uji Validitas

Uji validitas menentukan validitas kuesioner., menurut Ghozali (2018:52). Informasi yang akan dinilai oleh kuesioner disediakan melalui pertanyaan kuesioner yang valid.

Tabel.3 Hasil Validitas Variabel Pencegahan *Fraud* (Y)

Variabel	Indikator	Item	r Hitung	r Tabel (N=65)	Keterangan
Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)	Kebijakan	Y1	0,866	0,2441	Sesuai
		Y2	0,890	0,2441	Sesuai
	Prosedur	Y3	0,925	0,2441	Sesuai
		Y4	0,880	0,2441	Sesuai
	Pelatihan	Y5	0,876	0,2441	Sesuai
		Y6	0,888	0,2441	Sesuai
	Komunikasi	Y7	0,735	0,2441	Sesuai
		Y8	0,379	0,2441	Sesuai

Tabel berikut menunjukkan temuan uji validitas dari setiap butir pertanyaan pada variabel pencegahan *fraud* (Y). Hasil uji validitas diatas membandingkan r_{hitung} dengan r_{tabel} dimana

eCo-Buss

r_{tabel} dengan jumlah responden sebanyak 65 ($N= 65$) ialah 0,2441. Data diatas menunjukkan hasil bahwa butir pertanyaan Y_1 hingga Y_8 memperoleh r_{hitung} diatas angka r_{tabel} ($N=65 ; 0.2441$) dimana hal tersebut dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan Y_1 hingga Y_8 sesuai.

Tabel.4 Hasil Validitas Variabel SPIP (X_1)

Variabel	Indikator	Item	rHitung	rTabel (N = 65)	Keterangan
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X_1)	Lingkungan Pengendalian	$X_{1.1}$	0,870	0,2441	Sesuai
		$X_{1.2}$	0,850	0,2441	Sesuai
	Penilaian Risiko	$X_{1.3}$	0,904	0,2441	Sesuai
		$X_{1.4}$	0,941	0,2441	Sesuai
	Kegiatan Pengendalian	$X_{1.5}$	0,947	0,2441	Sesuai
		$X_{1.6}$	0,856	0,2441	Sesuai
	Informasi dan Komunikasi	$X_{1.7}$	0,539	0,2441	Sesuai
		$X_{1.8}$	0,887	0,2441	Sesuai
	Pemantauan	$X_{1.9}$	0,527	0,2441	Sesuai

Hasil tersebut untuk setiap pertanyaan variabel ditunjukkan tabel diatas, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X_1). Hasil uji validitas diatas membandingkan r_{hitung} dengan r_{tabel} dimana r_{tabel} dengan jumlah responden sebanyak 65 ($N = 65$) ialah 0,2441. Data diatas menunjukkan hasil bahwa butir pertanyaan $X_{1.1}$ sampai $X_{1.9}$ memperoleh r_{hitung} diatas r_{tabel} ($N=65;0,2441$) dimana hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pernyataan $X_{1.1}$ sampai $X_{1.9}$ dikatakan sesuai.

Tabel 5. Hasil Validitas Variabel Whistleblowing System (X_2)

Variabel	Indikator	Item	rHitung	rTabel (N = 65)	Keterangan
Whistleblowing System (X_2)	Aspek Struktural	$X_{2.1}$	0,927	0,2441	Sesuai
		$X_{2.2}$	0,866	0,2441	Sesuai
	Aspek Operasional	$X_{2.3}$	0,953	0,2441	Sesuai
		$X_{2.4}$	0,937	0,2441	Sesuai
	Aspek Perawatan	$X_{2.5}$	0,373	0,2441	Sesuai
		$X_{2.6}$	0,879	0,2441	Sesuai

Tabel tersebut menunjukkan hasil pemeriksaan validasi dari setiap butir pertanyaan pada variable *whistleblowing system* (X_2). Hasil uji validitas diatas menunjukkan r_{hitung} yang dihasilkan dari pengujian melalui SPSS 26 dengan r_{tabel} , dimana r_{tabel} dengan jumlah responden sebanyak 65 ($N=65$) ialah 0,2441. Data diatas menunjukkan hasil bahwa butir pertanyaan $X_{2.1}$ sampai $X_{2.6}$ memperoleh r_{hitung} diatas angka r_{tabel} ($N = 65; 0,2441$) dimana hal tersebut bisa dikatakan sesuai.

Tabel 6. Hasil Validitas Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_3)

Variabel	Indikator	Item	rHitung	rTabel (N=65)	Keterangan
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_3)	Pengetahuan	$X_{3.1}$	0,887	0,2441	Sesuai
		$X_{3.2}$	0,917	0,2441	Sesuai
	Keterampilan	$X_{3.3}$	0,918	0,2441	Sesuai
		$X_{3.4}$	0,853	0,2441	Sesuai
	Sikap	$X_{3.5}$	0,702	0,2441	Sesuai
		$X_{3.6}$	0,823	0,2441	Sesuai

Tabel diatas menunjukkan hasil dari uji validitas variable Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_3). Hasil uji validias diatas menunjukkan r_{hitung} yang dihasilkan dari pengujian melalui SPSS 26 dengan r_{tabel} dimana r_{tabel} dengan jumlah responden sebanyak 65 ($N=65$) ialah 0,2441. Data diatas menunjukkan hasil bahwa semua butir pertanyaan memperoleh r_{hitung} diatas angka r_{tabel} ($N=65;0,2441$) dimana hal itu bisa dikatakan sesuai dengan pertanyaan variable Skeptisisme Professional.

Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner yang menunjukkan suatu variabel atau konstruk diuji dalam uji reliabilitas, menurut Ghozali (2018:47). Jika setiap responden memberikan jawaban yang sama, maka kuesioner dianggap kredibel. Sugiyono (2020:190) menyatakan bahwa kesimpulan pengujian dicapai dengan cara membandingkan temuan Cronbach Alpha dengan pedoman dibawah ini:

1. Bila *Cronbach Alpha* memenuhi Kriteria (0,60) maka dianggap reliabel.
2. Bila *Cronbach Alpha* kurang dari Kriteria (0,60) maka dianggap tidak reliabel.

Hasil uji reliabilitas variabel penelitian ditunjukkan pada Tabel 7:

Tabel.7 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha	Keterangan
X1	0,935	Reliable
X2	0,913	Reliable
X3	0,923	Reliable
Y	0,922	Reliable

Semua variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,600, menurut perhitungan uji reliabilitas. Hal ini menunjukkan keandalan temuan penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas dengan Uji *Kolmogorof-Smirnov* berfungsi sebagai uji asumsi penelitian. Gambar di bawah ini menampilkan hasilnya:

Tabel.8 Hasil Uji Normalitas dengan Uji One Sample Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		65
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.47733536
Most Extreme Differences	Absolute	.065
	Positive	.050
	Negative	-.065
Test Statistic		.065
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d

Nilai *Asymp. Sig* sebesar 0,200 menunjukkan bahwa data terdistribusi secara teratur dan layak untuk diteliti karena berada di atas tingkat kesalahan maksimum 0,05.

Uji Multikolinearitas

Penelitian ini menguji multikolinearitas. Gambar di bawah ini menunjukkan Hasil Uji Multikolinearitas:

Tabel.9 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	4.909	2.219		2.212	.031		
	Sistem Pengendalian Internal	.404	.145	.434	2.796	.007	.177	5.657

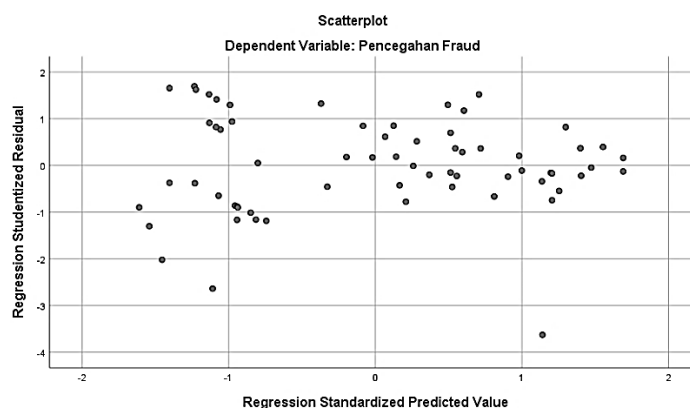
eCo-Buss

Pemerintah								
Whistleblowing System	.437	.176	.384	2.486	.016	.179	5.594	
Kompetensi Sumber Daya Manusia	.108	.108	.089	1.005	.319	.547	1.827	
a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud								

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X1), Sistem *Whistleblowing* (X2), dan Sistem Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) masing-masing memiliki nilai VIF masing-masing 5.657, 5.594, dan 1.827. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X1) memiliki toleransi 0,177 di atas 0,10, dan nilai VIF 5.594 di bawah 10. Multikolinearitas tidak ada.

Uji Heteroskedastisitas

Penelitian ini melakukan uji heteroskedastisitas, dan hasilnya ditunjukkan pada tabel berikut:



Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot berikut menunjukkan titik-titik yang tidak menyebar secara merata di atas dan di bawah angka 0. Model regresi tidak menunjukkan heteroskedastisitas.

Uji Parsial (Uji t)

Tujuan dari uji parsial adalah untuk memastikan sejauh mana setiap variabel independen berdampak pada variabel dependen. Batasan ditetapkan untuk pengujian ini dengan mengambil hipotesis berdasarkan nilai thitung. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan berikut ini akan menjadi dasar untuk menginterpretasikan hipotesis:

- b. Jika thitung dari variabel independen (X) melebihi tabel, maka variabel tersebut mempengaruhi variabel dependen (Y) sampai batas tertentu.
- c. Variabel independen (X) tidak mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (Y) jika thitung lebih kecil dari ttabel.

Hasil dari Uji Parsial sebagai berikut:

Tabel.10 Hasil Uji Parsial

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.909	2.219		2.212	.031		

eCo-Buss

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	.404	.145	.434	2.796	.007	.177	5.657
Whistleblowing System	.437	.176	.384	2.486	.016	.179	5.594
Kompetensi Sumber Daya Manusia	.108	.108	.089	1.005	.319	.547	1.827
a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud							

Tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pencegahan kecurangan Inspektorat Daerah Kota Bandung sangat dipengaruhi oleh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (nilai t_{hitung} 2.796 vs 1.99897, nilai signifikansi $0.007 < 0.05$).
- Whistleblowing* System Inspektorat “Daerah Kota Bandung membantu mencegah terjadinya kecurangan, dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,486 (lebih > t_{tabel} sebesar 1,99897) dan nilai signifikan sebesar $0,016 < 0,05$.”
- Nilai t_{hitung} sebesar 1,005 untuk kompetensi sumber daya manusia pada Inspektorat Daerah Kota Bandung berada di bawah t_{tabel} sebesar 1,99897 mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,319 > 0,05$, menunjukkan tidak ada pengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Uji Simultan (Uji f)

Dalam Uji Simultan, variabel dependen dan independen diselidiki secara terpisah atau bersama-sama. Berikut gambarnya:

Tabel.11 Hasil Uji Simultan

ANOVA						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig	
1	Regression	2202.336	3	734.112	57.865	.000 ^b
	Residual	773.879	61	12.687		
	Total	2976.215	64			

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengendalian intern pemerintah, *whistleblowing*, dan sumber daya manusia berperan dalam mencegah kecurangan di Inspektorat Daerah Kota Bandung. Secara signifikan, variabel independen secara keseluruhan memengaruhi variabel dependen, dengan nilai F_{hitung} 57,865 lebih besar daripada F_{tabel} 2,755, dengan nilai $0,000 < 0,05$.

Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa dekat hubungan antara variabel dependen dan independen. Jika rendah, faktor independen tidak dapat menjelaskan semua varians variabel independen. Tabel berikut menunjukkan koefisien determinasi:

Tabel.12 Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson

eCo-Buss

1	.860 ^a	.740	.727	3.56182	2.584
---	-------------------	------	------	---------	-------

Menurut tabel berikut, *R Square* adalah 74%, atau 0,740. Hal ini menunjukkan bahwa komponen lain memberikan kontribusi sebesar 26% terhadap pencegahan kecurangan, sedangkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, *Whistleblowing System*, dan Kompetensi SDM memberikan kontribusi sebesar 74% terhadap Pencegahan Kecurangan.

Pembahasan

1. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pencegahan *Fraud*

Hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian internal pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan Inspektorat Daerah Kota Bandung untuk menghindari penipuan. Sama halnya dengan Kuntadi et al. (2023), yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Studi Alfiansyah & Afriady (2022) juga menemukan hal yang sama, bahwa sistem pengendalian internal pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hasil ini berbeda dengan penelitian Akhyaar et al. (2022), yang menunjukkan bahwa tidak ada dampak yang signifikan. Sistem pengendalian internal membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana kecurangan dapat terjadi. Dengan melakukan evaluasi risiko secara menyeluruh, sistem pengendalian internal dapat menentukan area yang rentan terhadap kecurangan dan merancang kontrol yang sesuai untuk mengatasi risiko tersebut. Selain itu, sistem pengendalian internal membantu dalam merancang dan menerapkan pengendalian yang tepat dalam proses bisnis pemerintah. Ini termasuk pembatasan akses terhadap aset dan informasi, pemisahan tugas, verifikasi independen, dan audit internal. Oleh karena itu, semakin banyak upaya yang dilakukan untuk mencegah penipuan jika sistem pengendalian internal pemerintah sangat efektif dalam mencegah penipuan.

2. Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelaporan mempunyai dampak yang signifikan terhadap upaya pencegahan kecurangan di Inspektorat Daerah Kota Bandung. Hasil ini sejalan dengan Baihaqie & Sofie (2023), yang menunjukkan bahwa *whistleblowing system* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Studi oleh Aprillia & Sulfitri (2023) juga menemukan hal yang sama, tetapi menemukan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hasil ini berbeda dengan studi Yanto (2023), yang menemukan bahwa *whistleblowing system* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Sistem *whistleblowing* memungkinkan karyawan atau pihak eksternal untuk melaporkan tindakan mencurigakan atau penipuan yang terjadi di dalam perusahaan. Dengan demikian, hal ini memungkinkan organisasi untuk mendeteksi *fraud* lebih cepat sebelum kerugian yang signifikan terjadi. Laporan yang diterima melalui *whistleblowing system* dapat menyediakan wawasan berharga tentang area-area di mana ada kelemahan dalam kontrol internal atau kebijakan. Dengan menganalisis laporan-laporan tersebut, organisasi dapat mengidentifikasi pola-pola *fraud* yang muncul dan melakukan perbaikan pada proses atau kebijakan yang ada. Oleh karena itu, sistem *whistleblowing* yang berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* menunjukkan bahwa jika sistem berjalan dengan baik, kemungkinan terjadi kecurangan sangat rendah.

3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pencegahan *Fraud*

Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan di Inspektorat Daerah Kota Bandung, menurut sebuah penelitian. Hal ini memvalidasi temuan Kuntadi dkk. (2023) yang menyatakan bahwa pengalaman SDM tidak mencegah terjadinya kecurangan. Bertentangan dengan Suandewi (2021), yang menunjukkan kompetensi SDM menghambat terjadinya kecurangan. SDM yang kompeten akan membuat program pelatihan untuk berbagai level staf. Ini termasuk pelatihan tentang etika bisnis, integritas, kode etik,

serta pemahaman tentang tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori *fraud*. Dengan meningkatkan pemahaman karyawan tentang konsekuensi dari melakukan *fraud*, organisasi dapat meningkatkan kesadaran dan mencegah terjadinya tindakan *fraud*. Penelitian, bagaimanapun, menemukan bahwa kompetensi SDM yang rendah tidak memberikan pengaruh langsung pada pencegahan kecurangan.

4. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), *Whistleblowing System*, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pencegahan *Fraud*

SPIP, kompetensi SDM, dan prosedur pelaporan pelanggaran sangat memengaruhi pencegahan penipuan. SPIP juga dapat memberikan kerangka kerja untuk melakukan audit dan evaluasi lebih lanjut terhadap area-area yang dicurigai. *Whistleblowing system* menyediakan mekanisme untuk mendeteksi dini tindakan kecurangan. Kompetensi sumber daya manusia dalam menangani laporan *whistleblowing* dengan cepat dan tepat dapat memfasilitasi investigasi lebih lanjut terhadap dugaan kecurangan. Kolaborasi ketiga faktor ini memungkinkan organisasi untuk merespons dengan cepat terhadap tindakan kecurangan dan mengurangi dampaknya. Dengan demikian, apabila ketiga faktor tersebut menjadi konsentrasi perusahaan, kecil kemungkinan terjadinya kecurangan yang dapat merugikan perusahaan.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan mengenai sistem pengendalian internal pemerintah Inspektorat Daerah Kota Bandung, Tindakan kepemimpinan dapat meningkatkan pencegahan kecurangan karena Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memiliki dampak yang besar. Karena manfaat besar dari pelaporan pelanggaran, sistem pelaporan yang lebih kuat dapat membantu mencegah kecurangan. Karena kompetensi SDM tidak signifikan secara statistik, kompetensi SDM tidak mempengaruhi pencegahan kecurangan. Kata kunci: kompetensi SDM, pengendalian intern pemerintah, dan sistem *whistleblowing system* bekerja sama untuk mencegah kecurangan. Kecurangan dapat dicegah sebesar 74% oleh pengendalian internal pemerintah, 26% oleh variabel eksternal, dan 74% oleh sistem pelaporan pelanggaran dan kompetensi sumber daya manusia.

Daftar Pustaka

- Adiputra, I. M. S., Trisnadewi, N. W., Oktaviani, N. P. W., Munthe, S. A., Hulu, V. T., Budiastutik, I., Faridi, A., Ramdany, R., Fitriani, R. J., Tania, P. O. A., Rahmiati, B. F., Lusiana, S. A., Susilawaty, A., Sianturi, E., & Suryana. (2021). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Agoes, S. (2004). *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik* (1st ed.). Depok: UI Press.
- Akhyaar, K., Purwantini, A. H., Afif, N., & Prasetya, W. A. (2022). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2).
- Alfiansyah, I., & Afriady, A. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompensasi, dan Religiusitas terhadap Pencegahan Fraud (Studi Kasus pada BPKA Kota Bandung). *Jurnal Buana Akuntansi*, 7(1).
- Anderson, R. C. (2017). Board Characteristics Accounting Report Integrity and Cost of Debt. *Journal Accounting and Economics*, 37(3).

- Aprillia, R., & Sulfitri, V. (2023). Pengaruh Audit Internal, Kompetensi Auditor, Kesesuaian Kompensasi dan Whistblowing System terhadap Pencegahan Fraud. *Postgraduate Manajement Journal*, 3(1).
- Baihaqie, A. Z., & Sofie. (2023). Pengaruh Audit Internal, Whistleblowing System, dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1).
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik* (3rd ed.). Jakarta: Erlangga.
- Edison, E. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Ferdiansyah, B. (2022). KPK: IPK 2021 Jadi Gambaran Pemberantasan Korupsi Masih Harus Dibenahi. Jakarta: ANTARA.
- Fitrawansyah. (2014). *Fraud Auditing*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hantono. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung: Cv Media Sains Indonesia.
- Hariawan, I. M. H., Sumadi, N. K., & Erlinawati, N. W. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1).
- Kuntadi, C., Meilani, A., & Velayati, E. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(4).
- Lathifah, N. (2021). *Konsep dan Praktik Sistem Pengendalian Internal*. Padang: Insan Cendekia Mandiri.
- Lianto, T. W., & Purnamasari, P. (2020). Pengaruh Whistleblowing System dan Kompetensi Auditor terhadap Pencegahan Fraud. *Prosiding Akuntansi*, 6(2).
- Mahdi, S. A., & Darwis, H. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Wistleblowing Sistem Terhadap Pencegahan Fraud, Dengan Kecerdasan Spritual Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Aparat Pemerintah Desa Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 6(2).
- Misbahuddin, & Hasan, I. (2022). *Analisis Data Penelitian dengan Statistik (Edisi Kedua)* (2nd ed.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi Melalui Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Kementerian Pertahanan
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- Ristiyanto, N. (2013). *Perbedaan Audit Eksternal dan Audit Internal*. Ciawi: Pusdiklatwas BPKP.
- Sadat, A. (2020). *Governmental Accounting (Akuntansi Pemerintah)*. Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- Suandewi, N. K. A. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Moralitas dan Whistleblowing terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa Se-kecamatan Payangan). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D* (Edisi 2). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, D. (2014). *Auditing Pemeriksaan Akuntansi*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Susanti, R. (2023). Kasus Korupsi Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Sejumlah Pejabat dan Anggota Dewan Diperiksa. Jakarta: Kompas.
- Wibowo. (2018). *Manajemen Kinerja* (5th ed.). Depok: Rajawali Press.
- Yanto, A. F. F. (2023). Pengaruh Penerapan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud (Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan). *MIDA: Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi*, 20(1).